



Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/anthropos>

Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal

Community Empowerment Through Development of Non-formal Education Fields

Supsiloani*

Program Studi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Diterima: Mei 2019; Disetujui: Juni 2019; Diterbitkan: Juli 2019.

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang pendidikan non formal yang tidak kalah pentingnya dengan pendidikan formal dari semua tingkat pendidikan. Pendidikan non formal juga diharapkan bisa memenuhi kebutuhan penduduk dalam hal pengetahuan, informasi dan teknologi. Semua itu menjadi sangat diperlukan untuk meningkatkan mutu dan taraf hidup masyarakat. Pendidikan non formal dilaksanakan untuk mendapatkan keterampilan yang relevan bagi bekal mencari nafkah sehari-hari. Keterampilan yang didapatkan, menjadikan masyarakat memiliki sikap mental mandiri, pembaharuan dan pembangunan untuk kemajuan dan perkembangan negara. Kemandirian dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari yang berasala dari keahlian didapat, untuk dapat dan bisa dinikmati, berasal atas usaha sendiri. Begitupun hasil yang didapat, bisa dipertukarkan dengan pihak lain. Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Mutu, Pendidikan Non-Formal

Abstract

This article examines non-formal education which is not less important than formal education from all levels of education. Non-formal education is also expected to meet the needs of the population in terms of knowledge, information and technology. All of that becomes very necessary to improve the quality and standard of living of the people. Non-formal education is carried out to obtain relevant skills for the provision of daily living. The skills obtained, make the community have an independent mental attitude, renewal and development for the progress and development of the country. Independence in the fulfillment of everyday life, which is from expertise acquired, to be able and can be enjoyed, comes from one's own business. Likewise the results obtained, can be exchanged with other parties. Thus the ultimate goal is to empower the community, enable and build the ability to advance towards a better life on an ongoing basis

Keywords: Community Empowerment, Quality, Non-Formal Education

How to Cite: Supsilani (2019). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal. *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)*, 5 (1): 20-30.

*Corresponding author:
E-mail: supsiloani@hotmail.com

ISSN 2549-1660 (Print)
ISSN 2550-1305 (Online)

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma pembangunan yang mengutamakan peran serta lebih luas bagi masyarakat dalam proses pembangunan. Paradigma pemberdayaan dan pembangunan sama-sama bagian (model) implementasi teori perubahan sosial. Walaupun demikian, dalam tatanan realitas menurut Fakhri (2011), ada jurang yang memisahkan antara teoritis dan kalangan akademisi dengan para praktisi pemberdayaan atau pembangunan yang bekerja bersama masyarakat marginal, seperti kaum buruh, petani, nelayan, anak terlantar, dan masyarakat adat di berbagai daerah. Para teoritis dan akademisi berfikir dalam tataran obyektif dan idealitas dengan mengajarkan kepada peserta didik sesuai dengan kemajuan zaman tanpa ada rasa beban. Sementara para praktisi pembangunan yang didukung oleh elit politik dan atau pemerintah dan kaum bermodal dipengaruhi oleh kapitalisme yang berupaya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Bahkan, teori yang dipergunakanpun adalah teori yang mendukung visi kapitalisme.

Mardikanto (2012) menyatakan bahwa "Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan secara-terus menerus oleh

pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakat dipimpin oleh pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih untuk memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Demikianlah, pendidikan non formal dengan tataran obyektif dan idealitas dengan mengajarkan kepada peserta didik, dan juga sejalan dengan kemajuan zaman untuk memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan

PEMBAHASAN

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan menurut Prasetyo (2015) berawal dari

penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi Kepercayaan (*trusts*), Patuh Aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*)). Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *Knowledge*, modal (*money*), dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin sustainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build the trust*).

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (1995) menyatakan bahwa "*Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in political action, understanding*

how to 'work the system,' and so on" (Ife, 1995).

Definisi tersebut di atas mengartikan konsep pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Priyono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembangunan." Sedangkan konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan

atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu (Sumodiningrat, 2002).

Dewanta (1995) mengatakan pemberdayaan bertujuan menekan perasaan ketidakberdayaan masyarakat miskin bila berhadapan dengan struktur sosial-politis. Pemberdayaan masyarakat miskin berdasarkan konsep-konsep pemberdayaan intinya pemberdayaan masyarakat bermakna peningkatan asset dan kapasitas manusia dalam arti luas sehingga masyarakat berkemampuan menentukan pilihan dan bertindak sesuai dengan pilihan mereka dalam rangka memecahkan masalah hidupnya (Narayan,

2002; Kartasasmita, 1995b). Prioritas utama pemberdayaan masyarakat miskin adalah pengetahuan, keterampilan, dan motivasi (modal manusia).

Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu (Sumodiningrat, Gunawan, 2002); *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi

penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain).

Konsep Dasar Pembangunan

Beberapa istilah yang semakna dengan pembangunan, misalnya perubahan sosial, pertumbuhan, kemajuan evolusi (*evolution progress*), kemajuan (*advancement*) dan modernisasi

(Faderlind, 1989:4; Fakih, 2008). Moeljarto (1987) mengartikan pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peradaban manusia tidak akan mencapai wujudnya yang sekarang, apabila tidak terjadi proses perubahan sosial yang terus-menerus, meskipun dengan intensitas yang bervariasi, pada masa yang lalu. Konsep senada juga dikemukakan oleh Katz dan Seers dalam Moeljarto (1987), Soedjatmoko dalam Tjokroamidjojo dkk. (1988), Budiman (1995), McMichael (1996), Fletcher dalam Fagerlind (1989), dan Siagian (2007). Tentu masih banyak konsep lain dari para ahli yang berbeda yang intinya akan bermuara pada perubahan situasi dan kondisi

masyarakat menjadi lebih baik. Tujuan pembangunan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti dikemukakan oleh Kindervatter (1979) tujuan pembangunan adalah untuk menaikkan tingkat kehidupan masyarakat untuk memberikan semua manusia kesempatan untuk mengembangkan potensi-potensi mereka.

Menurut Haq dalam Tropp (2004) paradigma pembangunan manusia mempertimbangkan pemberdayaan penuh seluruh rakyat, untuk memungkinkan mereka menggunakan pilihan-pilihannya secara suka rela. Konsep pemberdayaan berhubungan erat dengan gagasan paradigma pembangunan manusia, yang mencakup semua pilihan – sosio-kultural, ekonomi, dan politik. Pembangunan yang berpusat pada rakyat sejalan dengan pemikiran Friedmann dengan istilahnya pembangunan alternatif (*alternative development*). Friedmann (1992) mengatakan pembangunan alternatif berarti memperbaiki kondisi-kondisi kehidupan dan penghidupan untuk mayoritas yang tersisihkan (kaum miskin), apakah pada skala global, nasional atau lokal. Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1988) menegaskan bahwa meningkatkan sumber daya manusia dipandang sebagai kunci bagi pembangunan yang dapat menjamin kemajuan ekonomi dan

kestabilan sosial. Sebab itu investasi harus diarahkan bukan saja untuk meningkatkan “*physical capital stock*” tetapi juga “*human capital stock*” dengan mengambil prioritas kepada usaha peningkatan mutu pendidikan. Pembangunan manusia menjadi alternative pembangunan sekarang dan di masa mendatang, yang meletakkan peningkatan modal manusia sebagai modal utamanya. Hal ini karena manusia sebagai objek dan sekaligus subjek pembangunan.

Pembangunan Bidang Pendidikan Nonformal

Modal manusia (*human capital*) merupakan salah satu kapital penting dalam setiap proses pembangunan, khususnya dalam usaha-usaha pengurangan kemiskinan. Bartlett (2004) mengemukakan tipe kapital itu ada empat, yaitu: kapital manusia, seperti pengetahuan, keterampilan; kapital sosial, seperti kelompok dan jaringan; kapital alam, seperti tanah dan air; kapital fisik, seperti rumah, jalan dan sanitasi; dan kapital finansial, seperti tabungan, kredit, dan tingkat upah.

Menurut Gary S. Becker alat utama peningkatan produktivitas manusia itu adalah pendidikan. Modal manusia dikonsepsikan sebagai produktif secara ekonomis. Modal manusia merupakan suatu jenis persediaan pengetahuan atau

seperangkat keterampilan yang diperoleh di sekolah atau di pekerjaan melalui pelatihan dan pengalaman, tetapi manfaatnya meningkatkan nilai karyawan di tempat kerja dan/atau produktivitas suatu perusahaan tempat dia bekerja. Schultz mendefinisikan teori modal manusia sebagai pengetahuan dan keterampilan yang orang-orang peroleh melalui pendidikan dan pelatihan sebagai sebuah bentuk kapital, dan kapital ini merupakan suatu produk investasi yang disengaja yang menghasilkan keuntungan (Nafukho et al., 2004).

Modal manusia adalah pengetahuan, keterampilan, dan motivasi yang dimiliki oleh masyarakat miskin sebagai modal untuk keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Kemampuan itu diperoleh melalui proses pendidikan (pelatihan). Pendidikan adalah alat pemroses perubahan pada diri manusia. Menurut Dahama dan Bhatnagar (1981) bahwa perubahan-perubahan sebagai hasil pendidikan itu adalah perubahan pada komponen-komponen perilaku, yaitu ide dan pengetahuan, norma dan keterampilan, nilai dan sikap, pemahaman dan perwujudan. Hasil pendidikan tersebut merupakan modal manusia. Ada tiga tipe pendidikan, yakni pendidikan formal (sekolah), pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Philip H. Combs dan Manzoor Ahmed adalah salah seorang ahli yang memberikan perhatian sangat serius dan mengkaji secara empiris tentang program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan nonformal. Mereka memberikan pandangan bahwa pendidikan nonformal cocok dan potensial bagi pemberdayaan masyarakat miskin baik untuk kalangan pemuda maupun orang dewasa, dan untuk masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Hal ini bisa dipahami dari sudut kajian konseptual maupun faktual tentang pendidikan nonformal dan kontribusinya pada pembangunan dalam arti luas. Dilihat dari sudut kajian konseptual kecocokan pendidikan nonformal bagi pemberdayaan masyarakat miskin bisa dipahami dari sifat pendidikan nonformal.

Combs & Ahmed (1973) mengatakan ada beberapa karakteristik pendidikan nonformal, yakni: (1) keluwesan (fleksibilitas) untuk disesuaikan dengan kebutuhan khusus setempat, serta dalam mengubah menyesuaikan kondisi dan kesempatan dalam memilih mata pelajaran serta memilih cara mengajarnya dan dalam mengadakan kombinasi pelajaran teori dan latihan praktis; (2) keleluasan untuk disesuaikan dengan keperluan anak-didik, misalnya dengan mengatur pengajaran sambilan yang disesuaikan

dengan tugas pada tempat bekerja atau dalam kalangan keluarga, dan dengan menyusun satuan-satuan pelajaran yang tertentu yang boleh dipelajari dan diselesaikan oleh masing-masing siswa dalam jangka masa dan pada waktu yang lebih cocok memungkinkan mereka masuk-keluar berganti-ganti ke dalam proses pengajaran, sesuai dengan kehendak dan kesempatan masing-masing; dan (3) Kemampuan untuk memanfaatkan tenaga ahli, fasilitas dan dukungan masyarakat setempat sementara memupuk rasa turut-memiliki dan turut-mengurus di kalangan masyarakat bersangkutan sehingga antara lain diperoleh kesempatan pendidikan yang lebih mampu bertahan dalam segi ekonominya (Combs & Ahmed, 1973).

Tugas pendidikan nonformal sebagai bahagian dari system pendidikan adalah memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Jenis pendidikan yang tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengarah pada tujuan bangsa dalam

rangka mencerdaskan bangsa yaitu: jalur pendidikan formal, jalur pendidikan nonformal, jalur pendidikan informal.

Pendidikan nonformal telah dijabarkan oleh UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana yang diuraikan dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut membagi tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Cakupan ketiga jalur pendidikan tersebut, diuraikan dalam pasal 1 ayat 11, 12, dan 13 bahwa: pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat

dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang; dan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 adanya Pendidikan Luar Sekolah (pendidikan nonformal) bertujuan untuk melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu kehidupannya, membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat dan/atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Konsep pendidikan nonformal merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pendidikan dan memiliki tugas dan tanggung jawab dengan pendidikan yang lainnya. Komar (2006) menjelaskan bahwa pendidikan nonformal adalah pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah baik di lembaga maupun tidak, melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan. Ungkapan senada juga diutarakan oleh Adikusumo (dalam Komar, 2006: 213) bahwa setiap kesempatan yang di dalamnya terdapat komunikasi yang

teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan, maupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya, dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan lingkungan masyarakatnya dan negaranya.

Konsep pendidikan nonformal ini merupakan konsep pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada masyarakat. Dengan harapan dapat mengubah pola pikir masyarakat dan dapat meningkatkan kehidupannya, sehingga dapat berbentuk kesadaran ingin berusaha dan berjuang untuk mengubah hidupnya, hal ini dapat diberdayakan melalui proses pendidikan nonformal. Peluang pendidikan nonformal dapat menyentuh lebih besar kepada aspek-aspek pemberdayaan, karena pembelajaran dalam pendidikan nonformal merupakan hubungan yang bersifat individual dan berpusat pada peserta didik. Program-program pendidikan nonformal berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, lapangan kerja, wirausaha dan sektor pembangunan umumnya. Pendidikan

nonformal pada dasarnya terselenggara atas kebutuhan pendidikan dan kebutuhan belajar yang tumbuh di masyarakat itu sendiri.

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah kondisi sumber daya manusia yang ada di masyarakat itu sendiri masih belum mampu memberdayakan potensi yang ada, sehingga diperlukan sentuhan dari luar yang dapat memotivasi dan memacu masyarakat, di sinilah peran pendidikan nonformal sangat diperlukan. Persoalan mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja abad 21 adalah persoalan pendidikan, termasuk melalui pendidikan nonformal, oleh karena itu, tanggung jawab bidang pendidikan merupakan fungsi yang sangat strategis sebagai upaya dasar dan merupakan titik sentral dalam upaya pengembangan sumber daya manusia (Soedomo, 1990).

Menurut Coombs, Pendidikan nonformal telah menjalankan fungsi mengembangkan wawasan, mengalihkan pengetahuan, melatih keterampilan, serta mengembangkan aspirasi belajar masyarakat. Kegiatan dalam pendidikan nonformal tidak hanya terbatas alam kegiatan tertentu saja, namun bisa terkait dengan berbagai program, yaitu development (Boyle, 1981). Fenomena

pendidikan tersebut, baik sebagai proses, sebagai kesadaran tujuan, maupun sebagai program kegiatan telah lama ada dan terjadi dalam khasanah kehidupan kita.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas sekali bahwa keberadaan pendidikan nonformal telah membantu memecahkan masalah yang di hadapi seseorang, kelompok, maupun kelembagaan.

SIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas sangat jelas dikatakan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal cocok dan potensial bagi pemberdayaan masyarakat miskin baik untuk kalangan pemuda maupun orang dewasa, dan untuk masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Hal ini bisa dipahami dari sudut kajian konseptual maupun faktual tentang pendidikan nonformal dan kontribusinya pada pembangunan dalam arti luas. Dilihat dari sudut kajian konseptual kecocokan pendidikan nonformal bagi pemberdayaan masyarakat miskin bisa dipahami dari sifat pendidikan nonformal. Selain itu juga Konsep pendidikan nonformal merupakan konsep pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada masyarakat. Dengan harapan dapat mengubah pola pikir masyarakat dan dapat meningkatkan kehidupannya, sehingga dapat berbentuk

kesadaran ingin berusaha dan berjuang untuk mengubah hidupnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, J. (1992). *Empowerment The Politics of Alternative Development*, Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Faizal. (2015). Diskursus Pemberdayaan Masyarakat. *Ijtimaiyya, Vol. 8, No. 1, Februari 2015*
- Heningtyas, M.A. (2012). Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Upaya Pengembangan Pendidikan NonFormal. *Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 2, Hal. 264-268*
- Komar, O. (2006). *Filsafat Pendidikan Nonformal*. Bandung: Pustaka Setia.
- Fakih, M. (2011). *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Insist Press.
- Prasetyo. (2015). Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat. Available At: <https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/>. Akses: 19 November 2017
- Prijono, O.S. & Pranarka, A.M.W. (1996). *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Penerbit Centre for Strategic and International Studies, Jakarta.
- Sapta, M. dkk. (2016). Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Masyarakat. Available At: <http://blog.unnes.ac.id/marsapw/2016/11/14/makalah-tentang-pendidikan-non-formal-dan-pengembangan-masyarakat/>. Akses: 24 januari 2018
- Sudiyono. (2006). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Otonomi Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan No. 02/Th II/Okttober*
- Sopandi, A. (2010). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kybernan, Vol. 1, No. 1 Maret 2010*.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Mardikanto, T. & Soebianto, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2012